

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Hakikatnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam upaya memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia terletak pada peran DPR sebagai lembaga legislatif yang bertugas untuk mengontrol dan memastikan bahwa eksekutif (Presiden dan kabinetnya) menjalankan tugas dan kebijakan sesuai dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kepentingan rakyat;
2. Penerapan fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden dilaksanakan dengan pengawasan atas pelaksanaan UU dan APBN. Fungsi pengawasan tersebut dijalankan dengan adanya 3 (tiga) hak DPR yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
3. Kewenangan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap Presiden bukan hanya penting, tetapi juga esensial untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Dengan menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif, DPR dapat menjaga keseimbangan kekuasaan, memastikan akuntabilitas, mencegah penyimpangan, dan meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah, yang semuanya berkontribusi pada penguatan sistem presidensial yang demokratis dan stabil.

B. Saran

1. DPR perlu menjaga independensinya dari pengaruh eksekutif dan partai politik. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat aturan yang mengatur konflik kepentingan, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa anggota DPR bebas dari tekanan politik yang dapat memengaruhi fungsi pengawasan mereka.
2. Untuk melakukan pengawasan yang efektif, DPR memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, termasuk akses terhadap data, informasi, dan tenaga ahli. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, seminar, dan akses ke penelitian terbaru juga penting untuk meningkatkan kompetensi anggota DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.
3. Keterlibatan publik dalam proses pengawasan perlu ditingkatkan melalui mekanisme seperti konsultasi publik, audiensi, dan penggunaan platform digital untuk mendapatkan masukan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, DPR dapat lebih efektif dalam menekan eksekutif untuk bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat.